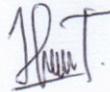


LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP AGRESIVITAS CINA DI PERBATASAN
FILIPINA



Hanum Trisudewi

20140510269

Yang Disetujui



Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si.

Dosen Pembimbing

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP AGRESIVITAS CINA DI PERBATASAN FILIPINA

Hanum Trisudewi

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: hanum.tri.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat sebagai respon atas agresivitas Cina di perbatasan Filipina. Agresivitas Cina di perairan di Laut Cina Selatan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap negara-negara di Asia Tenggara maupun Amerika Serikat. Keagresifan Cina tersebut sering kali terjadi di wilayah perbatasan Filipina yang menimbulkan ketegangan antara Filipina dan Cina. Oleh karena itu, Amerika Serikat selaku negara adikuasa melibatkan diri sebagai upaya untuk menjaga kestabilan di kawasan tersebut. Tulisan ini akan menjelaskan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi agresivitas Cina.

Kata kunci : *Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Agresivitas Cina, Asia Pasifik, Perbatasan Filipina, Laut Cina Selatan.*

Pendahuluan

Sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat telah mengambil peran kepemimpinan dalam upaya menjaga perdamaian di seluruh dunia dengan cara menegosiasikan perjanjian dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terjadi pada tiga tingkat yang berbeda, yaitu di tingkat global, di tingkat regional dan tingkat bilateral yang mana ditangani secara berbeda pula. Ada pula faktor yang mempengaruhi sikap Amerika terhadap wilayah atau negara tertentu yang salah satunya bisa dilihat dari tingkat kepentingannya. (Kochanek, 2017)

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga mencakup berbagai fungsi dan isu. Seperti misalnya isu keamanan yang telah berlangsung lama yang terjadi di kawasan Asia Pasifik yaitu sengketa Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan sengketa laut yang menjadi prioritas utama negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini. Perkembangan sengketa di Laut Cina Selatan melibatkan enam negara, yaitu empat negara anggota ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam), Cina dan Taiwan. Arti penting strategis seperti ini lebih mendominasi kepentingan negara-negara pengklaim atas kawasan ini. Posisi geografis kawasan Laut Cina Selatan ini diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang menjadikan kawasan ini sebagai jalur pelayaran kapal-kapal dagang, tanker maupun kapal perang. (Riyanto, 2009) Atas dasar tersebut, sengketa ini dianggap mengancam stabilitas keamanan, politik dan ekonomi kawasan dan konsekuensi ekonomi menjadi yang utama karena adanya potensi sumber daya alam dan keberlangsungan transportasi perdagangan di laut ini menjadi fokus kepentingan negara-negara yang bersengketa. Oleh karena itu, Amerika Serikat ikut terlibat dengan alasan untuk menjamin kebebasan navigasi di perairan itu dan menjaga kestabilan keamanan di kawasan tersebut.

Belakangan ini kawasan Asia Pasifik terutama Cina memang menjadi perhatian besar Amerika Serikat. Pertumbuhan Asia ini sangat penting bagi Amerika Serikat dalam menerapkan kepentingannya di kawasan tersebut. Secara ekonomi, pasar terbuka di Asia memberikan kesempatan Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan maupun investasi. Secara strategis, menjaga perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik sangat penting bagi kemajuan global, baik itu dengan mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, melawan upaya profelirasi Korea Utara ataupun memastikan transparansi dalam kegiatan militer oleh negara-negara di kawasan ini.

Peningkatan kekuatan Cina dikhawatirkan Amerika Serikat menjadi saingan hegemoninya terutama di kawasan Asia Pasifik. Hal ini lah yang membuat Amerika Serikat memfokuskan kehadirannya di Asia Pasifik dalam rangka menanggulangi peningkatan kekuatan Cina yang mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan beberapa cara untuk membatasi dominasi Cina di Asia Pasifik. Sehingga, fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak lagi ke kawasan Timur Tengah melainkan Asia Pasifik. (Bouchat, 2014) Hal ini direalisasikan dengan kebijakan "*rebalancing*" yang diumumkan pertama kali pada 2011 oleh Hillary Clinton. (Clinton, 2011) Rencana ini ditujukan untuk meningkatkan investasi dalam kemitraan ekonomi, diplomatik dan strategis di kawasan ini. Pemerintah Amerika Serikat juga berencana untuk melakukan perluasan perdagangan dan investasi di seluruh Asia,

peningkatan keterlibatan dalam lembaga multilateral regional, dan penempatan kehadiran militer dan promosi demokrasi dan hak asasi manusia di wilayah ini.

Salah satu strategi yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang berada di Asia Pasifik khususnya di Asia Tenggara seperti Filipina. Filipina merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan ini dan dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat berperan banyak dalam kondisi pertahanan dan keamanan Filipina. Namun, Amerika Serikat juga mengambil keuntungan dari persekutuannya dengan Filipina. Kepentingan Amerika Serikat dengan Filipina ini tentunya untuk membendung pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara.

Pengaruh Cina dalam sengketa di Laut Cina Selatan sangatlah besar sejak negara ini mendeklarasikan klaim atas perairan dan pulau Spratly dan Paracel. Didukung dengan perkembangan dan kemajuan ekonominya, membuat Cina semakin provokatif dalam menunjukkan kekuatannya guna mencapai kepentingannya di Laut Cina selatan.

Pada dasarnya, keagresifan Cina didasarkan oleh kepentingan nasional negara tersebut yang mana kawasan tersebut mengandung sumber daya alam yang melimpah. Cina mengklaim Laut Cina Selatan menggunakan sembilan garis putus (*nine dash line*) yang meliputi wilayah yang disengketakan dengan negara lain seperti Dangkalang Scarborough, Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Sedangkan wilayah yang diklaim oleh Filipina adalah Dangkalang Scarborough dan Kepulauan Spratly. Secara Hukum Laut PBB, Filipina dibenarkan dalam mengklaim wilayahnya yang mana “sebuah negara pesisir perlu memiliki tanah sebelum dapat mengklaim hak atas laut”. Klaim Cina tidak dibenarkan karena tidak ada gumpalan pulau dan bebatuan yang cukup besar untuk menghasilkan batas laut yang membentang lebih dari 2 juta kilometer persegi dari Cina.

Setelah mengeluarkan klaim *nine dash line*, Cina mulai bersikap agresif dengan melakukan patroli di wilayah Laut Cina Selatan dan meningkatkan militernya sejak tahun 2010. Cina mulai melakukan modernisasi substansial dari pasukan paramiliter maritim serta kemampuan angkatan lautnya untuk menegakkan klaim yuridiksinya dengan kekuatan militer apabila memang diperlukan.

Keagresifan Cina di perbatasan Filipina mulai terjadi pada 2011. Peningkatan kehadiran Cina tersebut menyebabkan terjadi beberapa serangan di perairan perbatasan Filipina. Pada tanggal 25 Februari 2011, 3 kapal penangkap ikan milik Filipina yaitu F/V Jaime DLS, F/V Mama Lydia DLS dan F/V Maricris 12 beroperasi di perairan lepas landas Jackson 140 mil dari Laut Barat Filipina. Menurut laporan dari Angkatan Bersenjata Filipina, kapal Cina mendekati kapal penangkap ikan Filipina dan mengusir serta mengancam akan

menembak. Saat kapal Filipina mulai menarik diri, kapal Cina melepaskan tiga tembakan yang mendarat 0,3 mil (556 meter) dari kapal F/V Maricris 12. Setelah 3 hari bersilang, pada tanggal 28 Febuari Filipina mendapati tiga kapal penangkap ikan Cina yang mengeksploitasi sumber daya kelautan di daerah tersebut. Pada tahun 2012, Cina mengerahkan kapal pemerintah dan perahu nelayan ke Dangkan Scarborough. Pada 2013, terdapat 32 kapal penangkap ikan Cina yang bergerak menuju ke Kepulauan Spratly.

Filipina juga menyatakan Cina memiliki sebuah kapal militer, dua kapal pengintai dan beberapa nelayan di sekitar Dangkan Thomas Kedua, yang mana wilayah tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusifnya. (Orendain, 2013) Atas dasar ini, Filipina mengajukan protes diplomatik dan melaporkan sikap Cina ke Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag Belanda. Melihat keagresifan Cina, memicu respon Amerika Serikat dalam konflik di kawasan ini. Sebagai negara yang dominan dalam sistem internasional, Amerika Serikat turut mengecam perilaku agresif Cina dalam mengklaim Laut Cina Selatan. Tulisan ini memiliki jangkauan penelitian dari tahun 2011 yang memperlihatkan agresivitas Cina di perbatasan Filipina hingga tahun 2016 atas respon yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.

Teori Tipologi Strategi Politik Luar Negeri John Lovell

Menurut John Lovell, strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Teori ini menganalisa menggunakan empat dimensi, yang setelah dipertemu-silangkan menghasilkan empat tipe strategi yaitu: konfrontatif, memimpin (*leadership*), akomodatif, dan konkordans. (Mas' oed, 1990)

Gambar 1. Skema tipologi strategi politik luar negeri John Lovell

		penilaian tentang strategi lawan	
		mengancam	mendukung
perkiraan kemampuan sendiri	lebih kuat	konfrontasi	memimpin
	lebih lemah	akomodasi	konkordans

Berdasarkan tipologi strategi yang dikemukakan oleh John Lovell, kita dapat mengetahui strategi yang perlu dipakai suatu negara dengan dipertemu-silangkan. Kita dapat mengamati dari penilaian pembuat keputusan tentang kemampuannya sendiri. Apabila negara tersebut menilai dirinya lebih kuat maka negara lawan akan dianggap lemah dan sebaliknya apabila negara tersebut menilai dirinya lebih lemah maka negara lawan akan dianggap lebih kuat. Begitu pula dengan penilaian terhadap strategi lawan akan menimbulkan dua opsi yaitu mengancam atau mendukung dengan melihat sikap lawan terhadap negara tersebut. Oleh karena itu terbentuklah empat tipe strategi atas perkiraan kemampuan sebuah negara ini. Strategi konfrontasi akan dipakai apabila negara tersebut menilai dirinya mempunyai power yang kuat sehingga negara lain akan dianggap mempunyai power lebih lemah namun sikap negara lawan tersebut menimbulkan ancaman. Adapun strategi kepemimpinan akan diambil apabila negara tersebut menilai dirinya mempunyai power yang kuat dan negara lawan mempunyai power yang lebih lemah dan sikap negara lawan tidak menimbulkan ancaman terhadap negaranya melainkan dapat mendukungnya. Adapun strategi akomodasi akan diambil apabila negara tersebut menilai dirinya memiliki power yang lemah sehingga secara otomatis dirinya menganggap negara lawan lebih kuat dari dirinya dan sikap yang ditimbulkan oleh negara lawan dinilai mengancam negaranya. Sedangkan strategi konkordansi akan diambil apabila sebuah negara menilai dirinya memiliki power yang lebih lemah dari negara lawan namun sikap negara lawan tidak menimbulkan ancaman terhadap negaranya.

Secara garis besar, tipologi ini menjelaskan bahwa strategi politik luar negeri suatu negara merupakan hasil kalkulasi dari untung dan ruginya dan mempertimbangkan strategi yang akan dipilih dengan melihat pada kemampuannya sendiri dan penilaian sikap negara lawan terhadap negaranya. Lebih tepatnya, tipologi ini menjelaskan bahwa penilaian kemampuan sendiri memiliki pengaruh besar terhadap strategi yang harus diambil. Begitu pula dengan pengaruh yang didapat dari perspektif negara tersebut terhadap negara lawan.

Strategi Konfrontasi Amerika Serikat Melalui EDCA

Kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang telah dirumuskan dan direncanakan untuk kemudian diterapkan terhadap suatu negara ataupun secara global. Dalam mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri, suatu negara perlu berhati-hati dengan melihat situasi yang terjadi maupun dengan kondisi kapabilitas negaranya sendiri. Oleh karena itu, keputusan pembuat kebijakan sangat penting dan berpengaruh besar dalam perumusan suatu kebijakan luar negeri.

Dalam menghadapi suatu konflik yang terjadi, suatu negara memerlukan strategi yang dapat melindungi negara maupun kepentingan nasionalnya sehingga strategi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Tipologi strategi politik luar negeri menurut John Lovell menjelaskan bahwa suatu kebijakan luar negeri merupakan hasil dari kalkulasi oleh para pembuat keputusan dalam memahami strategi lawan dan perkirannya terhadap kemampuan negaranya sendiri. Dalam empat jenis tipologi yang telah penulis sebutkan dalam bab I, strategi-strategi tersebut dibagi berdasarkan situasi negara sendiri dan negara lawan sehingga pembuat keputusan dapat memilih strategi yang sesuai dengan situasi yang ada karena situasi yang berbeda memerlukan strategi yang berbeda pula. Lebih tepatnya, tipologi ini menjelaskan bahwa penilaian kemampuan sendiri memiliki pengaruh besar terhadap strategi yang harus diambil. Begitu pula dengan pengaruh yang didapat dari perspektif negara tersebut terhadap negara lawan. Maka secara garis besar, tipologi ini berusaha menjelaskan bahwa strategi politik luar negeri merupakan hasil kalkulasi dari analisis untung dan rugi dimana suatu negara tentu akan mengambil strategi yang paling sesuai dengan situasi yang terjadi dan yang paling rendah resikonya.

Dalam menghadapi agresivitas Cina di perbatasan Filipina, Amerika Serikat mengambil strategi konfrontasi dengan berdasarkan hasil perhitungan dari perkiraan kemampuan sendiri dan strategi lawan menurut tipologi John Lovell. Dalam mengimplementasikan strategi *Rebalance* di Asia Pasifik, Cina menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Pertumbuhan Cina yang semakin meningkat membuat Cina bersikap semakin agresif dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Sikap agresif Cina di Laut Cina Selatan membahayakan stabilitas kawasan yang juga menjadi kekhawatiran Amerika Serikat. Untuk itu dalam menanggapi sikap agresif Cina yang memiliki kapabilitas negara yang kuat, Amerika Serikat perlu menggunakan strategi konfrontasi sebagai upaya meredam keagresifan Cina di kawasan Asia Pasifik yaitu dengan meningkatkan militernya di Filipina dan melakukan patroli gabungan yang merupakan bagian dari kesepakatan EDCA.

Kesepakatan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) telah dirundingkan sejak 2012. Pada awal tahun 2012, Amerika Serikat dan Filipina dikabarkan sedang merundingkan perluasan kerjasama militer dengan mempertimbangkan untuk mengoperasikan kapal-kapal Angkatan Laut AS di Filipina, mengerahkan pasukan bergilir dan lebih sering melakukan latihan gabungan. (Voa, Amerika-Filipina Rundingkan Perluasan Kerjasama Militer, 2012)

EDCA resmi ditandatangani pada tanggal 28 April 2014 oleh Duta Besar A.S. untuk Filipina Philip Goldberg dan Sekretaris Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin. (EDCA, 2014) Kesepakatan ini memberikan akses kepada pasukan Amerika Serikat atas pangkalan militer dan meningkatkan rotasi pasukan, pesawat tempur dan kapal perang di Filipina. (BBC, AS-Filipina teken kesepakatan militer baru, 2014)

Pemerintah Amerika Serikat dan Filipina menggambarkan hal ini sebagai bagian dari *rebalancing* militer AS yang bertujuan untuk menahan Filipina dari ancaman negara-negara tetangga dan bermaksud untuk menjaga laut Cina Selatan terbuka terhadap navigasi dan perdagangan internasional. (Sison, US and Philippines: How strategic is the partnership?, 2014) Militer Amerika Serikat akan menikmati akses yang lebih besar ke beberapa basis di kepulauan Filipina secara rotasional untuk jangka waktu 10 tahun. (Panda, US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Bolsters 'Pivot to Asia', 2014) Dalam hal ini, Filipina terbentuk sebagai pangkalan utama untuk memproyeksikan kekuatan angkatan laut dan udara Amerika Serikat dalam menghadapi ekspansi maritim Cina di Laut Cina Selatan. (Katigbak, US, Philippines agree on 5 base locations under EDCA, 2016) Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan AS Ashton Carter bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan ratusan pasukan dan pesawat tempur ke Filipina. Atas terjadinya kesepakatan EDCA dan patroli maritim gabungan ini, Cina pun merasa terancam dan bereaksi keras terhadap hal tersebut. (Frence-Presse, 2016)

Penempatan militer AS di Pangkalan Udara Filipina

Setelah kesepakatan EDCA di tanda-tangani, Amerika Serikat mulai meningkatkan bantuan militer sekitar 154 persen dari periode 2014-2015, yang merupakan jumlah terbesar sejak pasukan Amerika Serikat kembali ke Filipina pada tahun 2002. Peningkatan bantuan ini sebagian besar berupa peralatan komunikasi, senjata kecil, suku cadang pengganti untuk perangkat keras dan radar pesisir untuk keamanan maritim. Bantuan militer ini meningkat dari \$50 juta per tahun selama dua tahun fiskal terakhir menjadi \$ 127,1 juta pada 2015-2016. (Frence-Presse, 2016)

Pada 13 April 2016, kedua negara telah menyepakati 5 pangkalan militer yang akan ditempati oleh Amerika Serikat yaitu: 1. Fort Magsaysay, Nueva Ecija 2. Basa Air Base, Pampanga 3. Antonio Bautista Air Base, Palawan 4. Mactan-Benito Ebuen Air Base, Cebu 5.

Lumbia Airfield, Cagayan De Oro. (EDCA Agreed Location, 2016) Berikut adalah gambar lokasi yang disepakati:

Gambar 4.1

Lokasi Pangkalan Militer Filipina yang disepakati



Sumber: CNN, "U.S., Philippines announce five military bases for EDCA

Fort Magsaysay di Nueva Ecija adalah reservasi militer terbesar di Filipina dan area pelatihan utama. Basa di Pampanga, di sisi lain, adalah pangkalan Angkatan Udara Filipina utama sekitar 16 km dari pangkalan AS Clark Air yang lama. Fasilitas pelatihannya meliputi

pelatihan udara dan amfibi, bertahan hidup di hutan dan perang gerilya. Pasukan AS sudah menggunakan sebagian kecil dari reservasi untuk menyimpan persenjataan dan peralatan yang diperlukan untuk latihan tahunan Balikatan dengan militer Filipina. Pangkalan udara Antonio Bautista di Palawan adalah daerah yang sangat bergejolak yang diperebutkan hampir seluruhnya oleh Cina dan sebagian oleh Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Taiwan. Pangkalan udara Mactan-Benito Ebuen memiliki landasan setinggi 10.000 kaki, yang dibagi dengan bandara internasional Mactan-Cebu yang dibangun oleh Angkatan Udara AS pada pertengahan 1950-an sebagai jalur pendaratan darurat untuk pembom Komando Udara Strategis. Bagian dari bandara Lumbia di Cagayan de Oro akan diubah menjadi depot penyimpanan AS untuk peralatan bantuan bencana. (Katigbak, US, Philippines agree on 5 base locations under EDCA, 2016)

Menteri Pertahanan AS Ashton Carter mengumumkan bahwa 275 tentara dan 5 pesawat A-10 yang sebelumnya ada di negara itu untuk pertandingan perang Balikatan tahunan akan tetap berada di negara itu untuk sementara. Sekitar 200 personel Amerika Serikat akan ditugaskan untuk melatih tentara Filipina, serta melakukan operasi penerbangan. Kegiatan ini merupakan dasar bagi patroli udara bersama untuk melengkapi patroli maritim yang sedang berlangsung. Sedangkan sisanya akan ditempatkan di pangkalan militer Filipina dengan dasar rotasi yang tidak ditentukan untuk membentuk unit “perintah dan kontrol” yang mendukung peningkatan aktivitas antara kedua negara. (France-Presse, US fighter planes arrive in Philippines for training mission, 2016)

Pada 19 April, empat pesawat A-10C Warthogs terbang dari Lapangan Udara Clark ke sekitar Dangkan Scarborough yang berada 140 mil laut dari pulau Luzon di Filipina. Penerbangan pesawat A-10 ini ditujukan sebagai pesan halus ke Cina bahwa Amerika Serikat akan mengambil resiko eskalasi militer untuk menghalangi reklamasi pulau yang dilakukan oleh di Cina. A-10C merupakan bagian dari penempatan rotasi Angkatan Udara Komando Pasifik di Filipina yang mencakup 200 personel dan delapan pesawat antara lain lima A-10C Thunderbolt II pesawat serang darat, tiga helikopter HH-60G Pave Hawk, dan satu pesawat operasi khusus MC-130H. Ini merupakan bagian pertama dalam siklus reguler rotasi Angkatan Udara Amerika Serikat di Filipina. Rotasi lanjutan dari pesawat dan personel Amerika Serikat di Filipina akan ditentukan melalui konsultan dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) sebagaimana ditetapkan dalam EDCA. (Castro, EDCA and the Projection of U.S Air Power in the South China Sea, 2016) Selain itu, Amerika Serikat akan menyiapkan fasilitas logistik permanen untuk mendukung penerapan rotasi dan akan melakukan investasi

besar pada proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan kapasitas di lima pangkalan tersebut. (Tilghman, The U.S. military is moving into these 5 bases in the Philippines, 2016)

Pada 16 Juni 2016, pesawat tempur Amerika Serikat tiba di Filipina untuk misi pelatihan dan operasi untuk memastikan akses ke Laut Cina Selatan yang disengketakan dan pada Juli 2017, Amerika Serikat kembali mengirimkan dua pesawat pengintai untuk Filipina. Amerika Serikat mengerahkan pesawat sebagai upaya untuk melatih pilot Filipina dalam menanggapi perselesaian maritim dengan Cina seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa patroli udara merupakan kegiatan dasar untuk melengkapi patroli maritim yang berlangsung. (France-Press, US fighter planes arrive in Philippines for training mission, 2016) Berdasarkan kesepakatan EDCA yang memiliki jangka waktu 10 tahun, maka dipastikan kedepannya keberadaan militer Amerika Serikat di Filipina akan terus mengalami peningkatan secara perlahan dan pasti.

Patroli Gabungan AS-Filipina

Kesepakatan EDCA memungkinkan Angkatan Laut AS menggunakan teluk dalam air untuk mengirim material dan personel untuk latihan gabungan tahunan. Pada bulan November 2015, personel militer Amerika Serikat mengunjungi bekas markas AS di Subic Bay yang bertujuan untuk membantu Filipina dalam melawan Cina di perairan yang diperebutkan di Laut Filipina Barat seperti Dangkalan Scarborough. Subic Bay juga digunakan kapal-kapal Amerika Serikat sebagai *port resupply* selama panggilan rutin.

Amerika Serikat menyatakan bahwa peralatan militer akan dikirim pada rotasi reguler di Filipina dan kedua negara akan melakukan patroli bersama di Laut Cina Selatan karena Cina semakin menegaskan klaim teritorialnya. Inisiatif tersebut dirancang untuk menunjukkan bahwa kedua negara yakni Amerika Serikat dan Filipina meningkatkan kerjasama keamanan di tengah keprihatinan bersama atas tindakan Cina di perairan yang disengketakan.

Setelah kedua negara menyepakati 5 pangkalan militer yang akan ditempati oleh Amerika Serikat pada 2016, Amerika Serikat melakukan patroli di Laut Cina Selatan bersama Filipina sebagai respon atas pembuatan pulau oleh Cina dan meningkatkan kehadirannya karena menuduh Cina melakukan "militerisasi" sebuah wilayah yang dikunci dalam sengketa teritorial dan sekitar 80 pasukan AS yang sebagian besar marinir akan tetap berada di Filipina, setelah sebelumnya melakukan latihan militer gabungan "Balikatan".

Reklamasi pulau oleh Cina ini juga mendapatkan kecaman oleh negara-negara di Asia Pasifik khususnya negara Asia Tenggara. Dalam menanggapi reklamasi pulau yang dilakukan Cina, Amerika Serikat mengirimkan pembom dan kapal perang untuk patroli didekat kegiatan konstruksi Cina. (France-Presse, US, Philippines launch joint South China Sea patrols, 2016) Patroli gabungan antara Amerika Serikat dan Filipina pertama kali dilakukan di Laut Cina Selatan pada bulan Maret 2016 dan yang kedua terjadi pada awal bulan April.

Pada Juli 2017, Angkatan Laut AS dan Filipina menyelesaikan patroli yang terkoordinasi di Laut Sulu atas undangan Pemerintah Filipina. Operasi ini mencegah terjadinya pembajakan dan kegiatan ilegal yang terjadi di lintas batas laut dan menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan maritim Filipina. Tepat sebelum patroli ini, Amerika Serikat juga telah menyelesaikan Kegiatan Pelatihan Maritim dengan angkatan laut Filipina di sekitar Cebu. Latihan ini memberikan kesempatan untuk mempertajam keterampilan taktis dalam operasi keamanan maritim yang digunakan selama patroli terkoordinasi.

Pada September 2017, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk melakukan patroli lebih teratur di wilayah Laut Filipina Barat sebanyak dua sampai tiga bulan, untuk menegaskan kebebasan navigasi di perairan yang di klaim oleh Cina. (France-Presse, US eyes more regular west Philippine Sea patrols, 2017)

Tindakan Cina menyebabkan kecemasan dan meningkatkan ketegangan regional sehingga patroli ini akan terus membantu membangun interoperabilitas dan meningkatkan Angkatan Laut Filipina bahkan ketika patroli ini berkontribusi pada keselamatan dan keamanan perairan di kawasan tersebut. Kegiatan ini berupaya untuk menghalangi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari Cina dan patroli bersama akan membawa harapan bahwa nelayan dapat kembali berlayar bebas ke tempat penangkapan ikan yang kaya seperti Dangkan Scarborough yang mana menjadi wilayah penting bagi nelayan-nelayan Filipina. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan bagi para nelayan Filipina atas keberadaan Amerika Serikat di wilayah tersebut karena kehadiran Amerika akan membuat Cina berpikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam nelayan Filipina seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Kesimpulan

Sebagai negara hegemon, Amerika Serikat perlu aktif dalam menanggapi berbagai isu maupun konflik yang terjadi. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik yang mendapat campur tangan dari Amerika Serikat. Sengketa tersebut menjadi semakin memuncak dengan sikap agresif Cina dalam kegiatan-kegiatannya di kawasan tersebut. Agresivitas Cina yang terjadi pada permasalahan ini merupakan sikap Cina dalam memperoleh kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan. Keagresifan Cina menjadi ancaman bagi negara-negara yang bersengketa atas Laut Cina Selatan maupun Amerika Serikat. Amerika Serikat mengkhawatirkan kebebasan navigasi di wilayah tersebut yang mana kawasan tersebut menjadi jalur kapal dagang Amerika Serikat dan sebagian besar negara di dunia. Selain itu, keagresifan Cina yang diiringi dengan peningkatan militer dan ekonomi Cina dikhawatirkan akan mengganggu Amerika Serikat dalam menjalankan strategi *rebalancing* ke Asia Pasifik.

Filipina merupakan salah satu negara yang sering mengalami konflik langsung dengan Cina di perbatasan Filipina. Konflik-konflik yang terjadi atas keagresifan Cina di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Filipina ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak Filipina atas keamanan negaranya.

Dalam menjalankan strategi *rebalancing*, Amerika Serikat mendekati diri dengan aliansi-aliansinya yang berada di Asia Pasifik, salah satunya adalah Filipina. Amerika Serikat dan Filipina merupakan sekutu lama dan sama-sama mempunyai kekhawatiran terhadap Cina. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Filipina merundingkan kerjasama pertahanan sebagai upaya meredam Cina yang semakin agresif belakangan ini. Kerjasama pertahanan baru tersebut dinamakan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) yang disepakati pada 28 April 2014. Hal yang paling utama dari kesepakatan ini adalah peningkatan militer Amerika Serikat di Filipina yang akan dihadirkan secara rotasi dan modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina. Peningkatan militer Amerika Serikat yang dimaksud berupa tentara, pesawat tempur, dan kapal perang di Filipina yang kemudian akan ditempatkan secara rotasi di lima pangkalan militer Filipina yang telah disepakati oleh kedua negara pada 2016. EDCA menjadi pembentuk utama dalam proyeksi kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat dalam menghadapi ekspansi maritim Cina yang terealisasi dengan patroli gabungan antara Amerika Serikat dan Filipina.

Kesepakatan ini dirasa mampu mencegah Cina untuk agresif di perbatasan Filipina karena Cina tentu akan mempertimbangkan kembali sikapnya dengan melihat kehadiran Amerika Serikat di Filipina. Sejak berlakunya kesepakatan ini, Amerika Serikat mulai

melakukan pelatihan terhadap pasukan Filipina dan operasi penerbangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan dasar bagi patroli udara bersama untuk melengkapi patroli maritim yang sedang berlangsung. Secara perlahan, pasukan beserta peralatan-peralatan militer seperti pesawat tempur dan kapal mulai dikirimkan ke pangkalan militer Filipina.

Selain merespon agresivitas Cina, EDCA juga memberikan Amerika Serikat kesempatan untuk terus dapat berada di Asia Pasifik, memantau perkembangan Cina, dan menjaga eksistensinya sebagai negara hegemon sehingga EDCA dapat dianggap sebagai legalitas Amerika Serikat untuk terus berada di kawasan Asia Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- EDCA. (2014). Dipetik April 7, 2018, dari <http://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2014/04apr/20140428-EDCA.pdf>
- EDCA *Agreed Location*. (2016). Dipetik April 7, 2018, dari <https://www.state.gov/documents/organization/259256.pdf>
- BBC. (2011). *Philippine halts test after China patrol challenge*. BBC.
- BBC. (2014). *AS-Filipina teken kesepakatan militer baru*. BBC.
- Bouchat, C. J. (2014, Juni). *The Paracel Islands and U.S Interests and Approaches in The South China Sea*. Dipetik April 6, 2018, dari <http://publications.armywarcollege.edu/pubs/2279.pdf>
- Castro, R. C. (2016, Mei 20). *EDCA and the Projection of U.S Air Power in the South China Sea*. Dipetik April 7, 2018, dari Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/edca-projection-u-s-air-power-south-china-sea/>
- Clinton, H. (2011). *America's Pacific Century*. Foreign Policy.
- France-Presse, A. (2016). *US defense chief visits warship in South China Sea*. Rappler.
- France-Presse, A. (2016). *US fighter planes arrive in Philippines for training mission*. Rappler.
- France-Presse, A. (2016, April 14). *US, Philippines launch joint South China Sea patrols*. Dipetik April 7, 2018, dari Rappler: <https://www.rappler.com/nation/129490-usa-philippines-joint-south-china-sea-patrols>
- Katigbak, J. (2016). *US, Philippines agree on 5 base locations under EDCA*. Philstar.
- Kochanek, S. A. (2017). *US Foreign Policy in South Asia*. JSTOR.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mogato, M. (2016). *As alliance wavers, U.S. says gave Philippines big annual defense aid boost*. Dipetik April 7, 2018, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa/as-alliance-wavers-u-s-says-gave-philippines-big-annual-defense-aid-boost-idUSKBN14C0QA>
- Orendain, S. (2013). *Konflik di Laut Cina Selatan Semakin Memanas*. VOA.
- Panda, A. (2014, April 29). *US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Bolsters 'Pivot to Asia'*. Dipetik April 7, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/04/us-philippines-enhanced-defense-cooperation-agreement-bolsters-pivot-to-asia/>

- Philippines, D. o. (2014). *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) ON THE ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT*. Dipetik April 6, 2018, dari <https://www.dfa.gov.ph/dfa-releases/2693-frequently-asked-questions-faqs-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement>
- Riyanto, S. (2009). *Asean Regional Forum: Upaya menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik*. Yogyakarta: LP3M&UMY.
- Sison, J. M. (2014). *US and Philippines: How strategic is the partnership?* Dipetik April 7, 2018, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/us-philippines-how-strategic-pa-201442871034598657.html>
- Thayer, C. (2014, Mei 2). *Analyzing the US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement*. Dipetik April 7, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/05/analyzing-the-us-philippines-enhanced-defense-cooperation-agreement>
- Tilghman, A. (2016, Maret 21). *The U.S. military is moving into these 5 bases in the Philippines*. Dipetik April 7, 2018, dari Military Times: Andrew Tilghman, "The U.S. military is moving into these 5 bases in the Philippines" dalam <https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/03/21/the-u-s-military-is-moving-into-these-5-bases-in-the-philippines/>
- VOA. (2012). *Amerika-Filipina Rundingkan Perluasan Kerjasama Militer*. VOA.